

MEMPERKOKOH EKONOMI PADA SATUAN PENDIDIKAN DENGAN MENGEMBANGKAN BADAN USAHA MILIK SEKOLAH

Wahudin¹, Cahyono Purbomartono², Raden Beny Wijarnako³

¹Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

²Akuakultur, Fakultas Pertanian dan Perikanan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia;

³Magister Pendidikan IPS, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia
e-mail: wahudin@ump.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pentingnya membangun Badan Usaha Milik Sekolah (BUMS) di Sekolah Dasar sebagai sumber pendanaan alternatif dalam pembiayaan sekolah. Artikel ini merupakan bahan sosialisasi dalam pelaksanaan Iptek bagi Masyarakat (IbM) yang dilaksanakan di SD 1 Muhammadiyah Gentasari, Kroya Cilacap, Jawa Tengah. Selain melakukan sosialisasi, pengabdian juga melakukan pendampingan dan monitoring pembangunan BUMS. Hasil sosialisasi dan analisis menggambarkan, jika negara memiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemerintah Daerah memiliki (BUMD), dan Pemerintah Desa memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bumdes, mengapa sekolah tidak memiliki Badan Usaha Milik Sekolah (BUMS)? BUMS dibangun tak harus dengan modal besar, melainkan bertolak dari keadaan sekolah seadanya. Dimulai dari mengelola makan peserta didik, mengelola seragam sekolah, simpan pinjam warga sekolah, pada akhirnya BUMS bisa membangun toko, pabrik tekstil dan produk tekstil, bahkan tidak mungkin membangun perbankan. Dengan memiliki BUMS, memungkinkan sekolah memiliki sumber pendanaan alternatif yang tidak tergantung kepada negara dan orang tua siswa. Mereka memungkinkan menggaji guru lebih besar, membangun laboratorium yang memadai, dan menyiapkan berbagai fasilitas yang diperlukan bagi pendidikan.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Sekolah, Pembiayaan Sekolah, Pendanaan Alternatif

Abstract

This study aims to describe the importance of establishing a School-Owned Enterprise (BUMS) in Primary Schools as an alternative source of funding for school financing. This article is a socialization material in the implementation of Science and Technology for the Community (IbM) which was implemented at SD 1 Muhammadiyah Gentasari, Kroya Cilacap, Central Java. In addition to conducting socialization, the community service also provided assistance and monitoring for the development of BUMS. The results of the socialization and analysis illustrate that if the state has a State-Owned Enterprise (BUMN), the Regional Government has (BUMD), and the Village Government has a Village-Owned Enterprise (BUMDes) Bumdes, why don't schools have a School-Owned Enterprise (BUMS)? BUMS is built not necessarily with large capital, but rather starting from the existing state of the school. Starting from managing student meals, managing school uniforms, savings and loans for school residents, in the end BUMS can build shops, textile and textile product factories, and it is even impossible to build a bank. By having BUMS, schools can have alternative sources of funding that do not depend on the state and parents of students. They can pay teachers more, build adequate laboratories, and prepare various facilities needed for education.

Keywords: School-Owned Enterprises; School financing; Alternative funding.

PENDAHULUAN

Sekolah lazimnya mengandalkan pembiayaan pendidikan dari pemerintah pusat maupun daerah, orang tua siswa, dan yayasan, baik untuk membiayai operasional pendidikan maupun non-pendidikan (Wandra and Hadiyanto 2021: 2903). Kepala sekolah mempunyai peran signifikan jika ingin satuan pendidikan yang dipimpinnya mempunyai sumber pembiayaan lebih. Itulah yang dinamakan kepemimpinan entrepreneurship, yaitu kepala sekolah yang mempunyai kemampuan mengantisipasi perubahan, yang mampu dengan jelas menunjukkan visi yang ingin diwujudkan, berpikir kritis, fleksibel, mampu mengantisipasi perubahan, dan berorientasi pada masa depan (Komariah 2017: 22-23).

Kepemimpinan yang baik bahkan dapat mengantarkan satuan pendidikan menjadi sekolah unggul. Sekolah unggul tidak harus mahal, tapi bisa murah. Hal itu bisa diwujudkan dengan memaksimalkan anggaran pendidikan 20%, melaksanakan subsidi silang, memanfaatkan dana CSR

perusahaan, dan membangun badan usaha milik sekolah (Amiruddin 2019: 40). Negara mempunyai badan usaha milik negara (BUMN), sementara Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai badan usaha milik daerah (BUMD). Bahkan Pemerintahan Desa mengelola badan usaha milik desa (BUMDes). Kalau semua lembaga tersebut memiliki badan usaha yang dapat menopang pembiayaan mereka, mengapa sekolah (termasuk sekolah dasar) tidak mempunyai badan usaha milik sekolah (BUMS) seperti mereka? Jika sekolah berhasil mengelola BUMS, diharapkan warga sekolah semakin sejahtera. Tidak ada lagi guru honorer yang bergaji di bawah Rp 1 juta, apalagi di bawah Rp 500.000.

Memperjuangkan dana pendidikan alternatif bukan sekadar basa-basi politik, apalagi hanya janji kampanye, melainkan sesuatu yang serius dan sangat substantif. Sebagaimana dikemukakan Kaukab (2022), krisis yang paling mungkin muncul di Indonesia saat ini antara lain krisis ekonomi, pangan, dan energi, serta bagaimana kampanye politik berinteraksi dengan berbagai krisis ini. Analisis mengungkapkan bahwa krisis ekonomi adalah krisis yang paling mungkin terjadi di Indonesia tahun-tahun terakhir. Pada kenyataannya, para kandidat mengkapitalisasi berbagai krisis dalam kampanye mereka, khususnya krisis pangan. Meningkatkan resiliensi UMKM dibutuhkan untuk mengatasi krisis. Dukungan orientasi, pengetahuan, dan pengalaman kewirausahaan sangat penting untuk mempersiapkan UMKM dalam menavigasi krisis.

Untuk mencapai mutu sekolah yang baik, biaya pendidikan harus dikelola dengan optimal. Oleh karena itu, tahapan pada manajemen pembiayaan pendidikan perlu diperhatikan. Karena, pada dasarnya tujuan manajemen pembiayaan pendidikan adalah terselenggaranya proses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik yang diharapkan (Azhari & Kurniady, 2016). Pembiayaan pendidikan harus menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat, sebab permasalahan pembiayaan sangat strategis. Pelaksanaan PP No. 19/2005 berimplikasi pada kebutuhan untuk merumuskan standar pembiayaan yang meliputi standarisasi komponen biaya pendidikan yang meliputi biaya operasional, biaya investasi dan biaya pribadi. Standar pembiayaan pendidikan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di setiap Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di seluruh Indonesia (Sudarmono et al. 2021).

Meski demikian, Rustiawan (2021) mewanti-wanti untuk tidak terjadi komersialisasi pendidikan. Mahalnya pembiayaan pendidikan dapat disebabkan oleh dua faktor. Pertama, mahal karena pembiayaan pendidikan, seperti karena pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menjalankan proses pendidikan guna menghasilkan mutu pendidikan berkualitas. Kedua mahalnya pembiayaan pendidikan karena komersialisasi. Komersialisasi pendidikan dapat terjadi karena berbagai faktor, di antaranya adalah akibat dari ideologi kapitalisme liberalisme, mentalitas sumber daya manusia, pemberian otonomi pembiayaan sebahagian atau seluruhnya kepada lembaga pendidikan sehingga memberikan peluang yang lebar untuk menarik pembiayaan pendidikan guna kepentingan mendapat profit semata.

Nurhadi (2013) mengungkapkan, peningkatan mutu pendidikan dengan mengandalkan subsidi pemerintah saja tidak cukup. Oleh karena itu, sekolah harus berupaya mendapatkan lebih banyak sumber pendanaan Pendidikan, baik dari internal maupun eksternal, atau dari masyarakat atau dunia usaha melalui berbagai langkah. Agar sekolah mampu biaya yang memadai untuk mengoperasikan pendidikan yang terbaik, maka sekolah tersebut mempunyai sumber pendanaan tambahan. Diana et al., (2023) juga menegaskan, hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan pendanaan, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa dana, proses pendidikan belum bisa berjalan secara maksimal. Ada beberapa sumber dana pendidikan Islam yang bisa dimanfaatkan untuk mendanai pendidikan Islam yaitu bantuan dari pemerintah, bantuan dari orang tua siswa dan bantuan dari masyarakat seperti wakaf, zakat, sedekah dan hibah lain sebagainya.

Menurut Zulfa, (1970), zakat, infak, sedekah dan wakaf (ziswa) merupakan salah satu sumber pembiayaan pendidikan yang sangat potensial. Jika sekolah dan madrasah mampu secara kreatif, transparan dan akuntabel menggunakan ziswa sebagai sumber biaya pendidikan yang kaya, melimpah, dan tersedia secara berkesinambungan, yang dibingkai dalam pelaksanaan seluruh fungsi manajemen pembiayaan pendidikan secara transparan dan akuntabel, maka terwujudnya sekolah dan madrasah yang bermutu yang mampu menawarkan proses pendidikan yang high quality.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 menggariskan bahwa, (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat; (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat [4] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan

pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sementara Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah menyebutkan, kompetensi dasar yang harus dimiliki kepala sekolah meliputi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Sedangkan Permendikbud No. 6 Tahun 2018 tentang Kepala Sekolah Pasal 15 menjelaskan, (1) Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan; (1) Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.

Dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, dan Permendikbud No. 6 Tahun 2018 tentang Kepala Sekolah dapat disimpulkan bahwa, kepala sekolah dengan kompetensi kewirausahaannya bisa mengembangkan Badan Usaha Milik Sekolah sebagai upaya pendanaan alternatif. Kepala Sekolah bertanggung jawab atas bidang akademik, sekaligus bertanggung jawab atas BUMS sebagai bagian dari kompetensi kewirausahaannya. Dengan demikian, meskipun sekolah memerlukan pembiayaan yang besar, satuan pendidikan dapat memiliki "the second win" pendanaan alternatif. Itulah sebabnya, SD Muhammadiyah Gentasari, Kroya bermaksud memperkuat Badan Usaha Milik Sekolah (BUMS) dengan maksud mampu menyejahterakan warga sekolah.

SD Muhammadiyah 01 Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap adalah sekolah yang berdiri relatif lama, 1989. Itulah sebabnya, SD ini menjadi sekolah tujuan utama bagi masyarakat Desa Gentasari. SD yang terletak di Jln. Temulawak 01, Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, ini cukup ideal karena sudah menjadi pilihan bagi masyarakat. Sekolah yang populer disebut SD Musari ini mempunyai program unggulan yaitu: (1) Tahfidz Morning; (2) Pembiasaan Shalat Dhuha setiap hari; (3) Latihan Tapak Suci Putera Muhammadiyah; (4). Pembiasaan Shalat Berjama'ah di Masjid; (5) Latihan MTQ/Murotal; (6) Dan mengaji sore

Meski demikian, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Gentasari Nur Sangidah, S.Pd. bersama seluruh warga sekolah terus membuka diri untuk kemajuan. Dengan memperkuat BUMS, SD Muhammadiyah 01 Gentasari berharap memiliki pendanaan alternatif, di samping biaya yang berasal dari pemerintah dan dari masyarakat. Mereka semangat mengembangkan BUMS mengingat Gentasari merupakan gudangnya pengusaha, terutama pengusaha jamu yang terkenal ke seluruh Indonesia. Maka bagi SD Musari, mengembangkan kewirausahaan di sekolahnya merupakan tuntutan sejarah.

METODE

Metode yang digunakan untuk penyuluhan dan pelatihan membangun Badan Usaha Milik Sekolah di SD Muhammadiyah 01 Gentasari Kroya adalah sebagai berikut:

1. Pengabdian bekerja sama dengan Kepala Sekolah dan stakeholders SD Muhammadiyah 01 Gentasari Kroya melakukan pelatihan membangun BUMS;
2. Pengabdian memberikan presentasi dengan bersama-sama menyaksikan berbagai tayangan video tentang teknik membangun BUMS;
3. Pengabdian memberikan beberapa penekanan tentang pentingnya membangun BUMS dimulai dari membangun fondasi usaha, langkah yang dilakukan, dan pengembangan usaha;
4. Selama tiga bulan, pengabdian melakukan monitoring;
5. Di akhir bulan ketiga, pengabdian melakukan evaluasi tentang perkembangan keberhasilan pembangunan BUMS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekolah Dasar Muhammadiyah 01 Gentasari harus menjadi lembaga pendidikan unggul di Kecamatan Kroya. Maka, satuan pendidikan ini perlu membangun Badan Usaha Milik Sekolah. Program tersebut bisa berupa PT, CV, atau koperasi. Memiliki lembaga usaha memungkinkan bagi SD Muhammadiyah 01 Gentasari bergerak secara leluasa dalam bidang usaha, baik secara lokal, regional, bahkan nasional. Aktivitas bisnis tersebut memungkinkan SD Muhammadiyah 01 Gentasari semakin bersinar citranya. Pendidik dan tenaga kependidikan dapat menikmati hasil usahanya, sehingga melebihi pendapatan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan pada umumnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, SD Muhammadiyah 01 Gentasari perlu membangun BUMS. Semua aktivitas BUMS menjadi tanggung jawab penuh kepala sekolah. Meski demikian, BUMS dilaksanakan sesuai irama dunia usaha, sehingga lembaga ini murni menjadi lembaga ekonomi yang profesional. Itulah sebabnya, lembaga ekonomi pada BUMS bisa berupa Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), atau Koperasi. Ketiga bentuk lembaga ekonomi tersebut

memungkinkan digunakan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Meski demikian, koperasi menjadi pilihan paling luwes sebagai Lembaga ekonomi milik sekolah, asalkan dilaksanakan secara profesional.

Pelaksanaan pembangunan BUMS dilakukan dengan cara: (1) Membentuk badan usaha milik sekolah berupa PT, CV, atau koperasi; (2) Membangun usaha catering berbasis sekolah; (3) Membangun usaha tekstil; (4) Memberikan pelayanan simpan-pinjam untuk warga sekolah, karyawan, dan masyarakat; (5) Membuka toko untuk kebutuhan internal maupun eksternal. Sekolah Dasar Muhammadiyah 01 Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, merupakan salah satu bentuk Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) Pimpinan Ranting Muhammadiyah Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Berdiri tahun 1989, SD Muhammadiyah 01 Gentasari kini menjadi lembaga pendidikan yang menjadi tujuan utama masyarakat Desa Gentasari.

Masalah pendanaan pendidikan secara umum tidak menjadi masalah. Biaya sekolah relatif standar dibandingkan sekolah yang sama, namun semangat masyarakat menyekolahkan di SD Muhammadiyah 01 Gentasari ini tidak surut, bahkan cenderung semakin tinggi. Meski demikian, SD Muhammadiyah 01 Gentasari perlu menyiapkan masa depan yang lebih baik dengan mengembangkan badan usaha milik sekolah (BUMS).

BUMS adalah lembaga ekonomi milik sekolah yang menjadi sumber pendanaan alternatif, di samping dana yang berasal dari orang tua peserta didik dan pemerintah. Dengan menguatkan BUMS, SD Muhammadiyah 01 Gentasari diharapkan menjadi lembaga pendidikan prototype yang memiliki sumber pendanaan tidak hanya yang konvensional, tapi juga sumber pendanaan alternatif.

Dengan melakukan pelatihan pembangunan BUMS, SD Muhammadiyah 01 Gentasari diharapkan:

- a. Terbangunnya badan usaha milik sekolah (BUMS) sebagai lembaga usaha;
- b. Terbangunnya sistem ekonomi yang efektif, dengan mengintegrasikan pelayanan sekolah dengan lembaga ekonomi;
- c. Terbangunnya sistem ekonomi sekolah dengan mengintegrasikan dengan ekonomi masyarakat.

Pelatihan pembangunan BUMS, SD Muhammadiyah 01 Gentasari dilaksanakan, Jumat (30/8/2024) dengan kegiatan:

- a. Penyuluhan tentang pembangunan BUMS sehingga diharapkan dapat rbangun BUMS Muhammadiyah 01 Gentasari;
- b. Mengembangkan ekonomi secara lebih luas yang efektif, dengan mengintegrasikan pelayanan sekolah dengan lembaga ekonomi. Pengembangan ini dilakukan dengan memberdayakan Koperasi, membangun CV, atau PT;
- c. Mengembangkan ekonomi sekolah dengan mengintegrasikan ekonomi masyarakat, baik pada tingkat lokal, regional, maupun nasional. Dalam hal ini, sekolah melibatkan masyarakat sekitar dalam ekonomi yang diselenggarakan SD Muhammadiyah 01 Gentasari dalam skala nasional;
- d. Melakukan monitoring terhadap perkembangan pembangunan BUMS. Selesai sosialisasi pembangunan BUMS, pengabdian melakukan monitoring setelah tiga bulan, dan melakukan pendampingan sehingga pembangunan BUMS berhasil.

Sekolah Dasar Muhammadiyah 01 Gentasari harus menjadi lembaga pendidikan unggul di Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Mereka kemudian mengusahakan:

1. Satuan pendidikan ini membangun Badan Usaha Milik Sekolah. Targetnya adalah, SD Muhammadiyah Gentasari harus membangun badan usaha berupa PT, CV, atau koperasi. Memiliki lembaga usaha memungkinkan bagi SD Muhammadiyah 01 Gentasari bergerak secara leluasa dalam bidang usaha, baik secara lokal, regional, bahkan nasional. Aktivitas bisnis tersebut memungkinkan SD Muhammadiyah 01 Gentasari semakin bersinar citranya. Pendidik dan tenaga kependidikan dapat menikmati hasil usahanya, sehingga melebihi pendapatan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan pada umumnya;
2. Semua aktivitas BUMS menjadi tanggung jawab penuh kepala sekolah. Meski demikian, BUMS dilaksanakan sesuai irama dunia usaha, sehingga lembaga ini murni menjadi lembaga ekonomi yang profesional. Itulah sebabnya, Lembaga ekonomi pada BUMS bias berupa Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), atau Koperasi. Ketiga bentuk lembaga ekonomi tersebut memungkinkan digunakan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Meski demikian, koperasi menjadi pilihan paling luwes sebagai Lembaga ekonomi milik sekolah, asalkan dilaksanakan secara profesional.
3. Pelaksanaan pembangunan BUMS dilakukan dengan cara: (1) Membentuk badan usaha milik sekolah berupa PT, CV, atau koperasi; (2) Membangun usaha catering berbasis sekolah; (3)

Membangun usaha tekstil; (4) Memberikan pelayanan simpan-pinjam untuk warga sekolah, karyawan, dan masyarakat; (5) Membuka toko untuk kebutuhan internal maupun eksternal.

Badan Usaha Milik Sekolah (BUMS) diharapkan dapat menghasilkan keuntungan bagi sekolah. Hasil BUMS dapat digunakan sebagai sumber pendapatan tambahan yang digunakan untuk membiayai sekolah, sehingga dana pendidikan tidak terbatas dari pemerintah dan orang tua siswa melalui SPP, tapi juga tambahan dari hasil usaha sekolah. Maka Amiruddin (2019: 40) menyarankan, sekolah yang menginginkan menjadi satuan pendidikan yang unggul perlu membangun BUMS. Namun dia juga menyarankan agar sekolah tersebut mampu melahirkan keunggulan akademik, ekstrakurikuler, dan moralitas pada peserta didik. Keunggulan akademik dinyatakan dengan aneka jenis keterampilan yang diperoleh selama sekolah. Sedangkan keunggulan moralitas dilihat dari nilai hidup dan dorongan untuk maju.

Membangun BUMS merupakan tanggung jawab kepala sekolah. Hidayat, Dyah M, and Ulya (2019) menjelaskan, kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah di Abad 21. Sebab, kepala sekolah adalah: (1) merupakan seseorang yang diberi tugas memimpin sebuah sekolah, (2) kepemimpinan yang dimaksud adalah kemampuan untuk mempengaruhi sumber daya organisasi untuk bergerak mengikuti perintah untuk mencapai tujuan, (3) kepemimpinan kepala sekolah yang efektif ditinjau dari kepemimpinan entrepreneur, teladan, cerdas, dan demokratis, (4) abad 21 adalah era kemajuan teknologi di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi, (5) Ciri abad 21 yaitu informasi yang tersedia di mana saja dan dapat diakses kapan saja, komputasi yang semakin cepat, serta komunikasi yang dapat dilakukan dari mana saja dan kemana saja, (6) Kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah untuk menghadapi abad ke-21 yaitu dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.

Kepala sekolah harus bertanggung jawab atas terselenggarakannya BUMS, tapi tidak dicampurbaurkan dengan bidang akademik. Kepala sekolah harus mempunyai “dua kaki”, yang satu kaki memimpin usaha dalam BUMS, kaki satu lagi memimpin penyelenggaraan Pendidikan. BUMS dikelola oleh sumber daya manusia (SDM) yang profesional yang khusus mengelola usaha. Sedangkan guru dan tenaga kependidikan khusus mengelola pendidikan, sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Guru disarankan tidak ikut mengelola BUMS, sebaliknya pengelola BUMS disarankan tidak campur tangan di bisang akademik. Keduanya berjalan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing di bawah pengendalian kepala sekolah.

Menurut Kadarsih et al. (2020), tugas utama kepala sekolah adalah sebagai manajerial, supervisor, dan sebagai pemimpin kewirausahaan. Kepala sekolah merupakan keynote speaker atau orang kunci dalam memimpin, dan mengelola sekolah agar tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Kepala sekolah sebagai guru yang diberi tugas dalam mengelola dan memimpin sekolah harus tahu dan paham serta dapat mengaplikasikan apa yang menjadi tugas utama seorang kepala sekolah dalam bentuk tindakan nyata dalam memimpin dan memajukan sekolah dan pendidikan di Indonesia.

Membangun BUMS tidak harus memiliki modal uang dalam jumlah banyak, melainkan cukup dari kondisi yang ada. Usaha dimulai dari membangun kantin sekolah dengan membubarkan penjaja jajanan di sekitar sekolah. Membubarkan penjual jajanan dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari makanan yang tidak higienis, makanan dengan zat pengawet, makanan dengan zat pewarna berbahaya, dan berbagai jenis makanan tidak sehat lainnya. Penggantinya, anak mengonsumsi jajanan yang disiapkan kantin sekolah di saat jam istirahat sekitar pukul 8.30 s.d. 09.30 dan makan siang bersama setelah pukul 12.00. Sekolah harus menyiapkan aneka snack yang bervariasi, sehat, higienis, bebas dari zat pengawet, serta pewarna yang membahayakan. Setelah pukul 12.00, anak menikmati makan siang bersama yang disiapkan kantin.

Membubarkan pedagang di sekitar sekolah tentu dapat mengundang protes dari masyarakat. Mengatasi hal tersebut, BUMS harus merekrut para pedagang di sekitar sekolah sebagai karyawan BUMS. Mereka tinggal dididik untuk memasak makanan yang lebih higienis, bergizi, dan dan menarik. Sebagian dari mereka dilatih untuk menyajikan makanan yang baik. Dengan membuka kantin yang didukung sumber daya manusia (SDM) eks pedagang di sekitar sekolah, kantin bisa memberikan layanan snack di jam istirahat dan makan siang bersama. Di samping itu, sekolah bisa membuka kantin untuk masyarakat umum. Orang tua yang mengantar atau menjemput anak bisa menikmati jajan atau makan di kantin umum. Bahkan jika dikelola dengan baik, kantin umum ini dapat menjari restoran yang bagus.

Menurut Amitha Hoata, Sutardarma, and Ayu Dewi (2021), sarapan pagi dan status gizi memiliki banyak manfaat bagi anak usia sekolah untuk memelihara daya tahan tubuh sehingga mereka

dapat beraktivitas atau belajar dengan baik, membantu memusatkan pikiran untuk belajar dan memudahkan penyerapan pelajaran serta memenuhi zat gizi. Hasil analisis statistik menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara kebiasaan sarapan pagi dan prestasi belajar ($p=0,001$) dan tidak ada hubungan antara status gizi dan prestasi belajar ($p=>0,05$). Hubungan antara kebiasaan sarapan pagi dan prestasi belajar dapat menjadi indikator bagi siswa untuk melakukan sarapan secara rutin karena dapat meningkatkan prestasi belajar.

Selain mengelola konsumsi bagi peserta didik serta bagi masyarakat umum, BUMS juga perlu mengelola seragam sekolah. Jika sekolah dasar dari Kelas 1 s.d. Kelas 6 ada 450 siswa, maka sekolah tersebut setiap tahun harus menyiapkan 450 anak x 4 baju seragam yang meliputi (1) baju merah putih; (2) baju batik; baju Pramuka; (4) dan baju olahraga). Dengan demikian, sekolah harus menyiapkan setidaknya 1.800 setel baju seragam. Jika jumlah baju sebanyak itu beli di toko atau di pasar tentu harganya lebih mahal dibandingkan dengan jika membuat baju sendiri. Daripada beli, sebaiknya BUMS melatih para ibu di sekitar sekolah untuk menjahit. Agar harganya murah, pada awalnya ibu-ibu dilatih menjahit menggunakan mesin bekas. Saat BUMS mempunyai modal yang cukup, mesin-mesin bekas bisa diganti dengan mesin yang baru.

Ketika ibu-ibu yang pertama sukses menjadi tukang jahit, biasanya akan banyak ibu-ibu lainnya yang mendaftar ikut menjadi tukang jahit. Dalam kondisi demikian, BUMS sebaiknya tidak menolak. Tampung saja berapa pun jumlah ibu-ibu yang mendaftar menjadi penjahit. Yang perlu dilakukan adalah memperbaiki marketing. Setelah 1.800 setel pakaian selesai dibuat, jual saja produk pakaian ibu-ibu kepada sekolah dasar di tempat lain dengan harga yang lebih murah dibanding harga pasar maupun toko. Bahkan jika jumlah penjahit semakin banyak, BUMS dapat menjual baju seragam kepada pelajar di SMP, SMA atau sederajat. Bahkan, marketing yang baik dapat menjual seraga secara online. Baju seragam yang bagus dengan jahitan rapi dan harga murah memungkinkan BUMS menjadi perusahaan tekstil dan produk tekstil yang bonafid.

Semakin banyak SDM yang bekerja di sekolah maupun di BUMS menyebabkan munculnya berbagai kebutuhan. Di saat demikian, BUMS sebaiknya membuka toko yang menyediakan aneka macam kebutuhan. Diawali dari menjual sembilan bahan pokok (sembako), secara perlahan toko diperbesar sehingga menjadi swalayan yang melayani karyawan BUMS maupun warga sekolah, bahkan melayani masyarakat umum. Mereka yang menjadi anggota koperasi mendapatkan potongan harga yang menarik, sehingga memungkinkan koperasi sekolah bertambah anggotanya. Toko ini bisa menjual aneka produk BUMS, baik menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari maupun pakaian.

Banyaknya masyarakat yang terlibat dalam BUMS menyebabkan semakin kompleks pula persoalan, termasuk masalah keuangan. Mengatasi masalah ini, BUMS harus membuka layanan keuangan dengan membuat lembaga simpan pinjam. Warga sekolah maupun pegawai BUMS dapat menyimpan uang mereka di lembaga ini, atau meminjam untuk kebutuhan. Lembaga simpan pinjam ini perlu membangun layanan dua kamar. Kamar pertama untuk melayani keuangan komersial, dan kamar kedua untuk melayani keuangan yang bersifat sosial. Simpan-pinjam komersial harus dilakukan secara ketat mengikuti aturan main professional, sedangkan layanan sosial dimaksudkan untuk membantu keluarga besar sekolah dan BUMS dalam pendanaan yang bersifat social. Peminjam boleh mengembalikan dana yang dipinjamnya, atau boleh berupa hibah, tergantung dari alasan mereka meminjam dan kondisi keuangan peminjam. Banyaknya lembaga simpan-pinjam yang macet akibat lembaga tersebut tidak memisahkan dana sosial dengan komersial.

Jika BUMS berpengalaman memberikan pelayanan simpan-pinjam secara baik, mereka bisa membuka pelayanan bank. Misalnya, mereka bisa membuka Bank SD yang membuka kantor di tengah kota yang dapat memberikan layanan perbankan kepada siapa pun yang memerlukannya. Asalkan memenuhi syarat, baik kecukupan modal, perizinan, SDM, dan sebagainya, mengapa tidak sekolah, bahkan Sekolah Dasar membuka jasa perbankan? Ini adalah tantangan bagi pembuat regulasi agar sekolah mampu mandiri secara finansial. Dengan modal yang dimiliki, BUMS bisa mengembangkan ekonomi sektor riil yang lain seperti pertanian, peternakan, dan mengembangkan Usaha Menengah Kecil (UMK) lainnya.

Jika sekolah dengan BUMS menjadi lembaga yang memiliki pendanaan alternatif yang melimpah, maka sekolah dapat mengelola pendidikan tanpa tergantung kepada dana pemerintah maupun dari orang tua siswa. Sekolah bisa memberikan biasiswa kepada siapa pun yang memerlukannya. BUMS dapat menghasilkan keuntungan yang bisa digunakan untuk meningkatkan fasilitas sekolah, seperti membangun laboratorium baru, perpustakaan yang lebih lengkap, atau memperbaiki sarana olahraga. Selain sekolah tidak terlalu bergantung pada anggaran pemerintah, sekolah memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Bahkan dengan memiliki BUMS, sekolah

bisa menjadi tempat bagi siswa, guru, dan karyawan belajar berwirausaha. Keterampilan ini sangat berguna untuk masa depan mereka. BUMS sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan dana yang lebih memadai, sekolah bisa menghadirkan aneka program pendidikan yang lebih inovatif dan berkualitas. BUMS sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat, karena BUMS menjadi jembatan antara sekolah dengan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan BUMS, sekolah bisa mendapatkan dukungan yang lebih luas.



Gambar 1. Kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan SD 1 Muhammadiyah Gentasari Cilacap saat mengikuti sosialisasi pembangunan Badan Usaha Milik Sekolah (BUMS). Kegiatan dihadiri Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Drs. H. Sudaryono

Meski demikian ada beberapa hambatan yang mungkin terjadi dalam membangun BUMS. Pertama, perlu keahlian khusus. Artinya, mengelola BUMS membutuhkan keahlian khusus di bidang bisnis dan manajemen. Tidak semua sekolah memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan BUMS. Kedua, terkesan butuh modal awal yang besar. Sebab, tidak semua sekolah memiliki dana yang cukup untuk memulai bisnis. Padahal, membangun BUMS bisa bertolak dari yang ada. Ketiga, apalagi sebagian orang dibayang-bayangi risiko kegagalan. Memang, setiap bisnis memiliki risiko kegagalan. Tapi jika takut risiko, maka tidak pernah bejalan. Keempat, konflik kepentingan terkadang mewarnai tujuan pendidikan dan tujuan bisnis dalam pengelolaan BUMS. Hal ini perlu dikelola dengan baik agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Yang jelas, pemerintah perlu membangun regulasi bagaimana membangun BUMS agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses perizinan dan pelaporan bisa menjadi cukup rumit.

Tabel 1. Kegiatan dan Luaran Pembangunan Badan Usaha Milik Sekolah di SD 1 Muhammadiyah Gentasari, Cilacap

No.	Kegiatan	Target Luaran
1.	Penyuluhan tentang pembangunan BUMS	Terbangunnya BUMS Muhammadiyah 01 Gentasari
2.	Mengembangkan ekonomi secara lebih luas yang efektif, dengan mengintegrasikan pelayanan sekolah dengan lembaga ekonomi	Terbangun (Pemberdayaan) Koperasi, CV, atau PT.
3.	Mengembangkan ekonomi sekolah dengan mengintegrasikan dengan ekonomi masyarakat, baik pada tingkat lokal, regional, maupun nasional.	Terlibatnya masyarakat sekitar dalam ekonomi yang diselenggarakan SD Muhammadiyah 01 Gentasari dalam skala nasional.
4.	Mengembangkan ekonomi sekolah dengan mengintegrasikan dengan ekonomi masyarakat, baik pada tingkat lokal, regional, maupun nasional.	Terintegrasikannya ekonomi sekolah dengan masyarakat.
5.	Melakukan monitoring terhadap perkembangan pembangunan BUMS	Terselenggarakannya monitoring pembangunan BUMS



Gambar 2. Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan SD 1 Muhammadiyah Gentasari, serta Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kroya bertekad menyukkseskan Pendidikan dengan mencari pendanaan alternatif melalui pembangunan Badan Usaha Milik Sekolah.

SIMPULAN

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, Badan Usaha Milik Sekolah merupakan salah satu sumber pendanaan alternatif yang sangat diperlukan di Indonesia saat ini. Dengan memiliki pendanaan alternatif, sekolah tidak tergantung dengan dana pendidikan dari pemerintah dan iuran dari orang tua peserta didik. Sebaliknya, dengan membangun BUMS, sekolah diharapkan mampu memberikan gaji tambahan bagi guru dan menggaji guru honorer dengan layak. Bahkan memungkinkan pendidik dan tenaga kependidikan sejahtera karena BUMS berhasil. BUMS dibangun tidak harus dengan modal besar, tapi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dimulai dari bisnis catering, yang mengelola makan anak, membangun perusahaan tekstil dan produk tekstil, serta membangun perbankan.

SARAN

Beberapa saran perlu disampaikan: Pertama, SD Muhammadiyah Gentasari terus melakukan komunikasi dengan pengabdian sampai dengan diperoleh hasil dari BUMS secara maksimal. Kedua, SD Muhammadiyah perlu terus melakukan inovasi mengembangkan usaha, sehingga menjadi sekolah berbasis entrepreneurship unggul.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang telah membiayai pengabdian pada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Amiruddin. 2019. "Sekolah Unggul Mandiri." *Jurnal Kariman* 7(1). doi: 10.52185/kariman.v7i1.100.
- Amitha Hoata, Aprillia T., I.Wayan Gede Sutadarma, and Ni Nyoman Ayu Dewi. 2021. "Hubungan Kebiasaan Sarapan Pagi Dan Status Gizi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Sekolah Dasar." *E-Jurnal Medika Udayana* 10(10). doi: 10.24843/mu.2021.v10.i10.p17.
- Azhari, Ulpha Lisni, and Dedy Achmad Kurniady. 2016. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, Dan Mutu Sekolah." *Jurnal Administrasi Pendidikan* 23(2).
- Diana, Miska Rosa, Ferdian Ferdian, and Munir Munir. 2023. "Pengembangan Sumber Dan Alokasi Pendanaan Pendidikan Islam." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 9(3).
- Hidayat, Rais, Vicihayu Dyah M, and Himmatul Ulya. 2019. "Kompetensi Kepala Sekolah Abad 21: Sebuah Tinjauan Teoretis." *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah* 4(1). doi: 10.34125/kp.v4i1.394.
- Kadarsih, Inge, Sufyarma Marsidin, Ahmad Sabandi, and Eka Asih Febriani. 2020. "Peran Dan Tugas Kepemimpinan Kepala Sekolah Di Sekolah Dasar." *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan* 2(2).
- Kaukab, M.Elfan. 2022. "Latar Gelap Kampanye Politik 2023: Krisis Ekonomi, Pangan, Atau Energi?" *Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi* 21(2).
- Komariah, Nur. 2017. "Kepemimpinan Entrepreneurship Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kemandirian Pembiayaan Sekolah." *Al-Afkar : Jurnal Keislaman & Peradaban* 5(1).
- Nurhadi, Muljani A. 2013. "Mencari Alternatif Sumber Daya Pendanaan Pendidikan." *Jurnal Manajemen Pendidikan* 1(1).
- Rustiawan, Hafid. 2021. "Komersialisasi Pendidikan (Analisis Pembiayaan Pendidikan)." *TAZKIYA: Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 16(1).
- Sudarmono, Sudarmono, Lias Hasibuan, Kasful Anwar Us, and Sekolah Menengah. 2021. "Pembiayaan Pendidikan." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2(1).
- Wandra, Dedi, and Hadiyanto Hadiyanto. 2021. "Perencanaan Pembiayaan Pendidikan." *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan* 3(5). doi: 10.31004/edukatif.v3i5.1005.
- Zulfa, Umi. 1970. "Membangun Madrasah Bermutu Melalui Praktik Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat (Sebuah Alternatif Model Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia)." *Jurnal Kependidikan* 1(1). doi: 10.24090/jk.v1i1.529